

STRATEGI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Oleh:
Lulu Anastesi Sayekti

Abstract

Implementation of Regional Development in all aspects of life should concern to sustainability for the future. In the development plans prepared by the Regional Government must participate prioritize some aspects of the Sustainable Development, among other things, namely Pro Environment, Pro Poor People, Pro Gender Equality, Pro Job Creation, Pro Form of the Unitary Republic of Indonesia, Anti – Corruption, Corruption and Nepotism.

DIY City government, as the Local Government has the duty to ensure sustainable development of the region should pay attention to six aspects of Regional Development Sustainable. Sustainable Development Planning should be a priority of the regional government. The Planning Region of Yogyakarta in The Year of 2012-2016 has been covering all aspects of the Development Sustainable, but most programs are still focused on the effort to create good governance.

Key Indicators: Sustainable Development, Regional Development Strategy, the Local Government of Yogyakarta.

Pendahuluan

Pembangunan sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (G. Kartasasmita, 1994). Pada awalnya pembangunan diidentifikasi sebagai modernisasi, industrialisasi, dan bahkan westernisasi. Pemikiran tersebut secara keseluruhan didasarkan atas perubahan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander, 1994 dalam Nurman, 2015:18).

Pada umumnya, pembangunan nasional di negara berkembang seperti Indonesia ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan

ekonomi. Hal ini disebabkan karena keterbelakangan ekonomi merupakan permasalahan utama di negara-negara berkembang atau biasa disebut negara dunia ketiga. Namun, pada kenyataannya pembangunan di bidang ekonomi saja tidak menjamin pembangunan nasional yang stabil dan berkelanjutan apabila mengabaikan bidang-bidang lainnya seperti sosial budaya dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan dewasa ini dikembangkan dengan suatu pendekatan yang integral atau menyeluruh di segala bidang kehidupan.

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan globalisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan pada umumnya dapat mengakibatkan kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan. Dalam pembangunan sering terjadi eksploitasi-eksploitasi tanpa memperhatikan keberlangsungan untuk masa yang akan datang. Pembangunan harus tetap mengutamakan keseimbangan kehidupan.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya Perencanaan Pembangunan yang matang demi keberlanjutan pembangunan. Perencanaan Pembangunan memiliki fungsi secara umum, yaitu sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan; dapat diketahui potensi, prospek pengembangan, hambatan, serta risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang; perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik; dilakukannya penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan; dan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi (Arsyad (1999) dalam Nurman (2015)).

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan adanya Perencanaan Pembangunan dalam keberlanjutan beberapa aspek. Sebelum adanya era pembangunan keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan pembangunan tanpa memperhatikan aspek

lainnya. Namun, setelah dirasakan pentingnya pembangunan berkelanjutan, beberapa aspek lain harus diperhatikan selain aspek ekonomi yaitu aspek ekologis, sosial dan budaya.

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang memiliki perkembangan pembangunan yang pesat. Rencana strategis Pemda Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tertuang dalam RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016, harus memuat rencana-rencana pembangunan yang dapat menjadi indikator Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis strategi pembangunan berkelanjutan bagi Pemda Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012-2016.

Kajian Teori dan Pembahasan

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004:7), perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan dan teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik.

Sedangkan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) dalam Nurman (2015:188), perencanaan diartikan sebagai intervensi pada rangkaian kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (1) Meningkatkan efisinsi dan rasionalitas; (2) Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas; (3)Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Selain itu, menurut Riant dan Randy (2011) dalam Nurman (2015:188) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan upaya meminimalkan ketidakpastian.

Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan dapat diartiakn berbeda-beda oleh para ahli. Secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Ginanjar Kartasamita (1994)

dalam Nurman (2015) menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004) Tema pertama, yaitu terkoordinasi yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua, yaitu terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Tema ketiga, mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi pada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat termasuk adanya Perencanaan Pembangunan keberlanjutan.

Perencanaan Pembangunan adalah suatu teknik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan dirumuskan melalui badan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan merupakan bagian dari Manajemen Pembangunan. Manajemen Pembangunan merupakan suatu sistem pembangunan yang dimulai dari sistem pengelolaan data dan informasi pendukung kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengorganisasian dan pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian pembangunan, sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan (Randy Wrihatnolo, 2006)

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan SPPN adalah berikut: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana strategis Pembangunan Daerah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam UU No.25 Tahun

2004 Pasal 5 (2) menyatakan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis Pembangunan Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penjelasan Pasal 5 (2), disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dalam ayat ini merupakan rencana strategis daerah (Renstrada).

Unsur-unsur pokok dalam Perencanaan Pembangunan menurut Kamaludin, Rustian (1998) adalah:

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok Perencanaan Pembangunan lainnya.
2. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dianalisis dan dihubungkan sebagai variabel-variabel pembangunan serta dinyatakan impikasi dari hubungan tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber daya pembangunan khususnya mengenai sumber-sumber pembiayaan pembangunan.
4. Uraian tentang kerangka kebijakan yang konsisten.
5. Perencanaan Pembangunan meliputi program investasi yang dilaksanakan secara sektoral.
6. Perencanaan Pembangunan mencakup pula administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,

program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota Yogyakarta terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berada ditengah-tengah 4 (empat) Kabupaten tetangga yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Selain itu juga terletak pada simpul strategis kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan yaitu Solo ke arah timur, Magelang ke arah Utara serta Purworejo, Purwokerto dan Cilacap ke arah Barat, kemudian juga perlintasan Jawa bagian selatan yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi dan budaya, posisi ini cukup strategis untuk mengembangkan peran pelayanan Kota Yogyakarta, tetapi disisi lain juga harus memperkuat daya saing untuk dapat mempertahankan dan memperkuat posisi tersebut.

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. RPJMD tahap kedua tetap memperkuat unggulan peran Kota Yogyakarta agar memiliki daya saing melalui lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. Oleh karena itu visi pembangunannya masih tetap dalam kerangka visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, namun lebih dipertegas dengan penekanan pada pendidikan inklusi dan berkarakter serta ekonomi kerakyatan.

Misi Pembangunan Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012 – 2016 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 1. Misi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dan Penjelasanannya

Misi	
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Yogyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif) • Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat • Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Yogyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel)
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan ekonomi kerakyatan Memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya • Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif • Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan • Memperkuat daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa • Memperkuat Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan

Visi : Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas • Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua • Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau • Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai • Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat • Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul • Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat • Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Strategi Pembangunan Daerah

Menurut RD. Jatmiko (2003), strategi dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan anaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Sedangkan definisi strategi menurut J.A.Pearce II dan R.B. Robinson Jr. (2008) adalah rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan.

Secara umum, Pembangunan Daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pembangunan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Bagaimana daerah mengatasi permasalahan fundamental ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam konteks ini merumuskan visi, misi, dan memilih strategi yang tepat (Kuncoro, 2004). Sehingga Strategi Pembangunan Daerah dapat didefinisikan sebagai suatu cara Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat daerah yang berskala besar serta berorientasi jangka panjang dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk mengatasi permasalahan fundamental yang ada dan merangsang pembangunan ekonomi.

Paradigma baru dalam Pembangunan Daerah di Indonesia menurut Syafi'i (2007) dalam Nurman (2015), yaitu Pembangunan Daerah sangat mengandalkan pada potensi masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran keberhasilan bukanlah mengenai banyaknya perusahaan yang berdiri di daerah, melainkan berapa banyak angkatan kerja yang terserap oleh kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, pertimbangan keberhasilan bukan terletak pada banyaknya aset fisik yang dimiliki, melainkan pada kualitas lingkungan dan pengembangan kelembagaan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masarakat.

Tabel 1. Pendekatan dan Konsep Baru dalam Manajemen Pembangunan Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak kesempatan kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi penduduk setempat
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan komparatif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber Daya Pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi

Sumber: H.M. Syafi'i (2007) dalam Nurman (2015)

Kuncoro (2004), menjelaskan paradigma baru Pembangunan Daerah mengandaikan pembangunan yang ada didaerah mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
2. Pembangunan Daerah tidak hanya terait dengan sektor ekonomi semata, melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya birokrasi, dan lainnya.
3. Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menganalisis berbagai permasalahan strategis yang akan digunakan sebagai masukan dalam pembuatan sasaran pembangunan. Permasalahan-permasalahan startegis tersebut meliputi : 1) Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah; 2) Aparatur Pemerintah Daerah; 3) Kesehatan; 4) Infrastruktur dan Tata Ruang; 5) Pelayanan Administrasi; 6) Wajib Belajar 12 Tahun; 7) Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K); 8) Kemiskinan; 9) Kualitas Sumber

Daya Manusia; 10) Perekonomian Daerah; 11) Daya Dukung Pengembangan Usaha.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta melihat pada isu strategis nasional dan regional maka dalam pembangunan lima tahun ke depan ada beberapa isu strategis yaitu :

1. Reformasi Birokrasi
2. Kinerja Aparatur
3. Pelayanan Kesehatan
4. Perbaikan Sarana Prasarana Perkotaan
5. Pelayanan Adminitrasi Publik
6. Pendidikan Inklusif
7. Ekonomi Kerakyatan
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
9. Peningkatan Pembangunan SDM
10. Peningkatan Ekonomi Daerah
11. Kota yang Nyaman dan Aman

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dan juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan. Strategi umum yang diambil dalam rangka mencapai visi dan mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 yaitu meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga masyarakat kota Yogyakarta. Suatu Pemerintah Daerah yang baik adalah Pemerintah Daerah yang terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintah yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat dan bersedia untuk membangun kemitraan yang luas. Hal ini akan menjadi modal dasar bagi

- terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi dasar bagi pembangunan dan bersifat sangat strategis bagi pembangunan Kota Yogyakarta di masa mendatang, mengingat sumberdaya alam Kota Yogyakarta yang terbatas, dan tidak menjanjikan secara ekonomis. Barangkali, kita harus banyak belajar dari negeri tetangga, yang mampu mengembangkan sumberdaya manusia, dan akhirnya mampu menjadi bangsa yang besar dan berkarakter. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama segenap warganya harus menyatukan tekad untuk membangun manusia Indonesia dimulai dari Kota Yogyakarta.
 3. Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Fokusnya adalah menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, serta mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan ini diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis

Dari strategi umum pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dapat dilihat bahwa arah pembangunan sudah berlandaskan atas kebutuhan masyarakat yang sebelumnya telah dianalisis melalui permasalahan-permasalahan atau isu-isu pembangunan sebelumnya. Pembangunan juga tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi semata, melainkan juga bidang sosial, budaya, dan birokrasi. Pembangunan dilakukan secara bertahap, dimana strategi pembangunan tahun 2012-2016 merupakan strategi pembangunan tahap ke-2 dari penjabaran RPJP Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, yang diarahkan untuk membawa masyarakat Kota

Yogyakarta menuju suatu kehidupan yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna.

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah bagaimana memperbaiki kerusakan atau kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Brundland Report dari PBB dalam Nurman, 2015).

Tabel 2. Tahapan-tahapan Pembangunan Berkelanjutan

<i>Pro Sustainable Development</i>	<i>Sustainable Development</i>		
	<i>Phase I</i>	<i>Phase II</i>	<i>Phase III</i>
<i>Economic Productivity (Growth) as main objective of development</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Productivity</i> • <i>Ecological Suitable</i> <p><i>Need to be reached and balanced out in development</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Productivity</i> • <i>Ecological Suitable</i> • <i>Social Justice</i> <p><i>Need to be reached and balanced out in development</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Economic Productivity</i> • <i>Ecological Suitable</i> • <i>Social Justice</i> • <i>Cultural Vibrancy</i> <p><i>Need to be reached and balanced out in development</i></p>

Sumber: Sarosa, Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 dalam Nurman, 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam setiap tahap pembangunan berkelanjutan terdapat tujuan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Pada tahap selanjutnya, tujuan pembangunan menjadi lebih komprehensif meliputi berbagai aspek kehidupan dan mengutamakan pencapaian dan keluaran pembangunan yang seimbang. Tahap pertama meliputi pertimbangan pada aspek ekonomi dan ekologi. Tahap kedua menambahkan aspek keadilan

sosial. Terakhir, pada tahap ketiga, memasukkan pertimbangan aspek politis dan sosial budaya dari masyarakat sekitar.

Otto Soemartono dalam Sutisna (2006) mengajukan enam tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Daerah guna menilai keberhasilan Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses Pembangunan Berkelanjutan:

1. Pro Lingkungan Hidup
2. Pro Rakat Miskin
3. Pro Kesetaraan Gender
4. Pro Penciptaan Lapangan Kerja
5. Pro dengan Bentuk Negara Kesatuan RI
6. Anti Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme.

Dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditentukan, maka dapat dibuat Strategi dan Arah Kebijakan RJMD Kota DIY Tahun 2012-2016. Strategi dan arah kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program. Dari strategi, arah kebijakan dan program-program, kita bisa mendapatkan gambaran umum mengenai proses Pembangunan Berkelanjutan yang dibuat oleh Kota DIY Tahun 2012-2016.

Jika mengacu pada indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan, maka secara umum, semua indikator telah dipenuhi dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Indikator Pro Lingkungan Hidup, Pro Kesetaraan Gender, Pro Penciptaan Lapangan Kerja, Pro Bentuk NKRI, Anti KKN. Atau Indikator Pembangunan Berkelanjutan lainnya, yaitu Pro Ekonomi Kerakyatan, Pro Lingkungan Berkelanjutan, dan Pro Keadilan Sosial.

No.	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
1.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD/unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan internal SKPD/unit kerja yang menyangkut administrasi, kinerja, 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Internal SKPDLintas
2.	Peningkatan kapasitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan • Menyediakan pedoman etika penyelenggaraan pemerintahan dan budaya kerja • Mengembangkan pelayanan publik menuju pencitraan pelayanan prima • Memperkuat pelaksanaan tata pemerintahan dan pelayanan berbasis kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah • Program pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa • Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan • Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan
3.	Pewujudan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penyelesaian persoalan hukum • Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah • Mengoptimalkan pengkajian produk hukum daerah dan tata hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan Hukum
4.	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan pembinaan dalam rangka pengendalian internal • Mengembangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan sistem pengawasan internal

5.	Peningkatan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah • Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah • Melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah • Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah • Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah • Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah • Program Peningkatan Barang Daerah
6.	Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan perencanaan penganggaran berbasis kinerja • Melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Anggaran Daerah • Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan • Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang- undangan yang Berlaku
7.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif • Memperkuat jejaring penelitian dan pengembangan pembangunan • Mengembangkan data dan statistik pembangunan Mengefektikan pengendalian dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Pengembangan Data/Informasi • Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan • Program Pengendalian Pelaksanaan

			Pembangunan
8.	Peningkatan pelayanan umum, komunikasi, dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan • Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, dan keprotokolan pemerintah daerah • Mengoptimalkan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah • Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika • Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah • Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah • Program Pengembangan Kerjasama Daerah • Program Peningkatan Layanan Pada DPRD
9.	Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan regulasi bagi pengembangan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola karir • Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel • Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberda 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan manajemen kepegawaian • Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional • Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat

10.	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar • Meningkatkan kesejahteraan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas SDM
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas			<ul style="list-style-type: none"> •
1.	Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non-formal, atau informal	<ul style="list-style-type: none"> • Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan basis inklusif • Menyediakan jaminan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Wajar 12 Tahun
2.	Peningkatan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan Mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas • Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dan pembelian makanan tambahan bagi kelompok rentan dan anak sekolah • Mengurangi jumlah balita gizi buruk dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Upaya Pelayanan Kesehatan • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang • Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit • Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan • Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga
3.	Pengendalian penyakit dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan penyebaran penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kejadian luar biasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

	penyehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan dan pembinaan 	
4.	Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin • Meningkatkan partisipasi jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat menuju Universal Coverage 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
5.	Penyediaan regulasi dan sumber daya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan • Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan
6.	Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju keluarga siaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat dan promosi Kesehatan • Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
7.	Peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota • Mengembangkan kawasan citrakota • Mengoptimalkan penataan kawasan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum • Program Penataan Kawasan Sungai
8.	Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan • Meningkatkan kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan • Meningkatkan kualitas sistem jaringan drainase Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air limbah • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana persampahan • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase • Program Pengembangan Kinerja

		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemenuhan kebutuhan bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan khususnya yang ada di wilaya dan berwawasan inklusif 	<p>Pengelolaan SAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman • Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
9.	Peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan cakupan pelayanan kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran • Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam
10.	Peningkatan sistem transportasi perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan • Meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas dan angkutan jalan • Meningkatkan penataan parkir kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan • Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas • Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran
11.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan • Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil

			<ul style="list-style-type: none"> • Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Misi 3: Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto			<ul style="list-style-type: none"> •
1.	Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan • Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha • Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat • Meningkatkan ketahanan pangan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah • Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan • Meningkatkan pemberdayaan, kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak • Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan • Meningkatkan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial • Meningkatkan Gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Penanggulangan kemiskinan
3.	Peningkatan wawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter dalam koridor Negara Kesatuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4.	Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan

	kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	pembinaan pengembangan olahraga	Pengembangan Generasi Muda <ul style="list-style-type: none"> • Program Fasilitasi Olahraga
Misi 4: Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat			•
1.	Peningkatan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pendidikan berkualitas • Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan • Meningkatkan daya tarik perpustakaan dan budaya baca masyarakat • Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan ketenaga kerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah • Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informasi • Program Pengembangan Pendidikan • Program Pengembangan Taman Pintar • Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi • Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas • Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja • Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja • Program Pengembangan Kawasan transmigrasi

2.	Pengembangan pariwisata berbasis budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi dan kerjasama pariwisata Mengembangkan ODTW dan wisata MICE • Mengembangkan gerakan sadar wisata berbasis komunitas • Melestarikan nilai-nilai budaya kraton Yogyakarta sebagai modal sosial masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata • Program Pengembangan Destinasi Pariwisata • Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata • Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya
3.	Pengembangan potensi ekonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan industri kreatif • Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional • Meningkatkan pertanian perkotaan berbasis rekreatif hobbies • Meningkatkan fasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang/usaha informal 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM) • Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar • Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi • Program Pengembangan Pasar • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan • Program Pengembangan Budidaya Perikanan • Program Peningkatan Perdagangan • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4.	Pengembangan lingkungan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

	kondusif bagi dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban • Program Peningkatan Ketaatan Hukum
5.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau publik dengan dominasi tanaman perindang • Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk pemangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau • Program Fasilitasi Pertanahan • Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup • Program Konservasi Sumber Daya Alam

Indikator Pro Lingkungan Hidup dapat dicermati dari program-program pembangunan yang memiliki strategi Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku mutu, dengan program-programnya, yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Program Fasilitasi Pertanahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup, dan Program Konservasi Sumber Daya Alam.

Indikator Pro Rakyat Miskin dapat dicermati dari program-program pembangunan dengan strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berafirmatif Gender, dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan memiliki program-program Pro Rakyat Miskin, yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Selain itu, terdapat salah satu program pembangunan, yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan melalui strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender. Dalam strategi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat, terdapat Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Indikator Pro Kesenjangan Gender dapat dicermati dari program-program pembangunan dengan strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender. Program-programnya, yaitu Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat; Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial.

Indikator Pro Penciptaan Lapangan Kerja dapat dicermati melalui strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Lingkungan yang Kondusif bagi Dunia Usaha. Program-program dalam strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah, yaitu Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan menengah (IMKM); Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar; Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi; Program Pengembangan Pasar; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Peningkatan Perdagangan; dan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Untuk strategi Pengembangan Lingkungan yang Kondusif bagi Dunia Usaha, dicanangkan beberapa program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan Perizinan; Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban; dan Program Peningkatan Ketaatan Hukum.

Indikator Pro dengan Bentuk NKRI dapat dianalisis dari strategi peningkatan wawasan kebangsaan dengan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Indikator lainnya yang menjadi syarat Pembangunan Berkelanjutan adalah Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Indikator ini dapat dianalisis dari strategi Pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima dan Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal secara efektif, dan Peningkatan kapasitas SDM aparatur. Program-programnya antara lain: Peningkatan sistem pengawasan internal; Program pengembangan manajemen kepegawaian; Program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional; Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian; dan Program Peningkatan Kualitas SDM.

Program-program pembangunan yang tertuang dalam secara keseluruhan RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 masih didominasi oleh program-program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki 10 (sepuluh) strategi dan 34 (tiga puluh empat) program. Yang artinya dari 110 (seratus

sepuluh) program yang ada, terdapat 31% program untuk misi ini, sedangkan untuk program-program Pembangunan Berkelanjutan, masih terbilang sedikit jumlahnya.

Kesimpulan dan Saran

Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi tuntutan bagi semua organisasi baik swasta maupun pemerintah, tak terkecuali Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memiliki strategi-strategi dalam mengatasi isu-isu pembangunan terkait dan menjawab tuntutan Pembangunan Berkelanjutan secara sekaligus.

Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuangkan strategi-strategi Pembangunan Berkelanjutannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota DIY Tahun 2012-2016. Strategi-strategi yang ada di dalam RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 ini telah sesuai dengan indikator-indikator Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Indikator Pro Lingkungan Hidup, Indikator Pro Rakyat Miskin, Indikator Pro Kesenjangan Gender, Indikator Penciptaan Lapangan Kerja, Indikator Pro NKRI, dan Indikator Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Namun, program-program pembangunan yang tertuang dalam secara keseluruhan RPJMD Kota DIY Tahun 2012-2016 masih didominasi oleh program-program untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki 10 (sepuluh) strategi dan 34 (tiga puluh empat) program. Yang artinya dari 110 (seratus sepuluh) program yang ada, terdapat 31% program untuk misi ini, sedangkan untuk program-program Pembangunan Berkelanjutan, masih terbilang sedikit jumlahnya.

Oleh karena itu, Pemkot DIY sebaiknya lebih menerapkan Pembangunan Berkelanjutan pada strategi-strategi pembangunannya mengingat pentingnya Pembangunan Berkelanjutan ini bagi masyarakat Yogyakarta. Strategi dan program yang mendukung Pembangunan

Berkelanjutan lebih ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan (Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi Perencanaan, dan Peluang)*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah (Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan)*. Jakarta; LP3ES.
- Nugroho, Riant dan Randy Wrihatnolo. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafiindo Persada.
- Pearce II, J.A dan R.B. Robinson. 2016. *Manajemen Strategis (Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Edisi 12-Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2012 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016*.
- RD. Jatmiko. 2003. *Manajemen Stratejik*. Malang: UMM Press.
- Sutisna, N. 2006. *Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. TEMPO Interaktif.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.